

Bahasa dan Pembangunan Karakter Bangsa¹

Multamia RMT Lauder
Departemen Linguistik, Fakultas Ilmu Pengetahuan Budaya, Universitas Indonesia
email: multamia@ui.ac.id

1. Pembuka

Bahasa adalah salah satu kemampuan alamiah yang dianugerahkan pada umat manusia. Sedemikian alamiahnya sehingga kita tak menyadari bahwa tanpa bahasa, umat manusia tak mungkin mempunyai peradaban yang di dalamnya termasuk agama, ilmu pengetahuan, dan teknologi. Dengan demikian, tidaklah berlebihan jika kita mengatakan bahwa kajian mengenai bahasa diperlukan karena hampir semua aktivitas manusia memerlukan bahasa. Dalam hal ini, wawasan kebahasaan dapat dimanfaatkan untuk pembangunan karakter bangsa.

Upaya untuk meningkatkan peran bahasa Indonesia dan Melayu diyakini dapat membantu pembangunan karakter bangsa. Penggalan nilai-nilai luhur budaya bangsa yang terkristalisasi dalam bahasa perlu dihidupkan kembali kepada generasi muda agar mereka menjadi manusia modern yang tidak tercerabut dari akar budaya itu. Sebagai langkah awal, perlu rasanya, kita memahami keragaman bahasa dan budaya yang kita punyai bersama. Informasi ini kita perlukan agar kita mendapat gambaran seberapa kompleks keragaman yang ada di antara sesama negara ASEAN, khususnya Negara-negara yang menggunakan bahasa Indonesia dan Melayu. Selanjutnya, kita dapat memasuki ranah pembangunan karakter bangsa yang akan dikaitkan dengan peran bahasa yang milik individu dan juga milik masyarakat.

Pemaparan saya, untuk Syarahan MABBIM ini, tentunya menurut sudut pandang situasi dan kondisi Indonesia. Namun sebagai bangsa yang sama-sama berada di kawasan Asia Tenggara, diharapkan cukup banyak hal dari pemaparan ini yang dapat dimanfaatkan bersama. Harapan itu dapat dikembalikan ke Visi ASEAN 2020: “*We envision the entire Southeast Asia to be, by 2020, an ASEAN community conscious of its ties of history, aware of its cultural heritage and bound by a common regional identity*”. Sebuah komunitas—dalam hal ini komunitas ASEAN—dapat dibangun andaikata ada apresiasi di antara sesama para anggotanya dan juga ada semacam kesamaan pandangan atau persepsi. Sehingga kita dapat duduk bersama membangun sebuah komunitas dengan pandangan dan persepsi yang sama menuju masa depan dengan mempertimbangkan segala keragaman yang kita punyai baik itu bahasa, agama, dan budaya.

Agar memiliki wawasan yang sama, ada baiknya dimulai dengan memahami posisi bahasa Indonesia dan bahasa Melayu di tataran lingkup dunia.

¹ Makalah ini merupakan bahan Studium Generale yang disajikan di Indonesia, Malaysia, dan Brunei Darussalam dalam rangka kegiatan Syarahan MABBIM pada tanggal 22—29 Juli 2010.

2. Situasi Kebahasaan di Dunia

Menurut kajian evolusi bahasa, bahasa pertama kali muncul di muka bumi ini diperkirakan sekitar 100.000 tahun yang lalu. Sejak pertama kali bahasa itu menyebar ke seluruh dunia seiring dengan migrasi penduduk, bahasa itu berkembang sesuai keperluan penuturnya. Dalam perjalanan waktu, perkembangan itu menghasilkan sekitar 15.000 bahasa. Namun akhir-akhir ini, jumlah bahasa yang ada di seluruh dunia menurun drastis. Kini semua bahasa di dunia diperkirakan hanya berkisar sekitar 6000 bahasa saja (Crystal 1990).

Dari keenam ribu bahasa itu, para ahli bahasa bersepakat untuk mengelompokkannya menjadi 17 rumpun bahasa (Comrie 2003) yaitu :

-
- *Indo-European,*
- *Uralic,*
- *Altaic,*
- *Chukotko-Kamchatkan,*
- *Caucasian,*
- *Afro-Asiatic,*
- *Nilo-Saharan,*
- *Niger-Congo,*
- *Khoisan,*
- *Eskimo-Aleut,*
- *Na-Dene,*
- *Amerind,*
- *Dravidian,*
- *Sino-Tibetan,*
- *Austriac,*
- *Papuan,* dan
- *Australian Aboriginal.*

Diperkirakan sekitar 12,36% dari semua bahasa di dunia terdapat di Indonesia. *Summer Institute of Linguistics* (SIL 2006) berdasarkan surveinya mencatat bahwa Indonesia memiliki 742 bahasa daerah. Jumlah ini menempatkan Indonesia pada peringkat kedua sebagai surga keanekaragaman bahasa setelah Papua New Guinea yang tercatat mempunyai 867 bahasa daerah. Persebaran bahasa di seluruh dunia tidak merata apabila ditinjau berdasarkan benua atau wilayahnya.

Ada wilayah yang keanekaragaman bahasanya sangat tinggi namun ada pula wilayah yang tidak terlalu beragam bahasanya. Ternyata wilayah Asia merupakan wilayah yang memiliki keanekaragaman bahasa yang tertinggi yaitu 2034 bahasa atau sekitar 31% dari semua bahasa di dunia. Selanjutnya, wilayah Afrika juga mempunyai keragaman bahasa yang tinggi yaitu sebanyak 1995 bahasa atau sekitar 30%. Wilayah Australia dan Pasifik yang wilayahnya terbentang luas dan sebagian besar merupakan kepulauan adalah tempat bersemayamnya 1341 bahasa atau sekitar 21%. Sedangkan wilayah Amerika memiliki 949 bahasa atau sekitar 15%. Akhirnya, wilayah Eropa hanya mempunyai 209 bahasa atau sekitar 3% dari semua bahasa di dunia (Crystal 1990: 287). Namun, karena adanya proses perdagangan serta kolonisasi di masa lampau, walaupun jumlah bahasa-bahasa di Eropa hanya berkisar 3%, justru beberapa bahasa inilah yang akhirnya tumbuh menjadi alat komunikasi di tingkat dunia.

Di seluruh dunia, berdasarkan jumlah penutur, kondisinya juga sangat bervariasi. Ada bahasa-bahasa yang penuturnya ratusan juta orang hingga bahasa-bahasa yang penuturnya tinggal 1 orang. Comrie (2003: 19) mencatat bahwa penutur bahasa-ibu yang jumlahnya 50 juta orang atau lebih di seluruh dunia diperkirakan hanya terdiri dari 20 bahasa saja yaitu:

- Bahasa Cina (1 miliar penutur),
- Bahasa Inggris (350 juta penutur),
- Bahasa Spanyol (250 juta penutur),
- Bahasa Hindi (200 juta penutur),
- Bahasa Arab (150 juta penutur),
- Bahasa Bengali (150 juta penutur),
- Bahasa Rusia (150 juta penutur),
- Bahasa Portugis (135 juta penutur),
- Bahasa Jepang (120 juta penutur),
- Bahasa Jerman (100 juta penutur),
- Bahasa Prancis (70 juta penutur),
- Bahasa Punjabi (70 juta penutur),

- Bahasa Jawa (65 juta penutur),
- Bahasa Bihari (65 juta penutur),
- Bahasa Italia (60 juta penutur),
- Bahasa Korea (60 juta penutur),
- Bahasa Telugu (55 juta penutur),
- Bahasa Tamil (55 juta penutur),
- Bahasa Marathi (50 juta penutur).
- Bahasa Vietnam (50 juta penutur).

Berdasarkan catatan Comrie itu, ada beberapa hal yang harus kita cermati. Bahasa Jawa menduduki peringkat ke-13, namun jika dikoreksi bahwa bahasa Jawa dituturkan oleh 75.200.000 orang, maka bahasa Jawa dapat menduduki peringkat ke-11. Informasi mengenai bahasa Cina yang tercatat memiliki penutur 1 miliar sebenarnya agak menyesatkan. Sebetulnya yang dianggap bahasa Cina itu terdiri dari berbagai bahasa daerah seperti bahasa Kanton, Khe, atau Hokian yang tidak memiliki pemahaman timbal-balik (*mutual intelligibility*) satu dengan lainnya. Dengan demikian, agar sejajar dengan pemilahan yang dilakukan terhadap bahasa-bahasa di Indonesia dan India, informasi mengenai Bahasa Cina harus dirinci juga berdasarkan bahasa daerahnya. Selanjutnya, andaikata semua variasi bahasa Melayu dari berbagai negara dan yang terdapat di seluruh Indonesia digabungkan maka tak tertutup kemungkinan bahasa Melayu termasuk sebagai salah satu bahasa-ibu terbesar di dunia.

Keberadaan bahasa Melayu memang agak sulit dideteksi mengingat variasi bahasa Melayu di seluruh Indonesia menggunakan berbagai nama yang berbeda misalnya *Bahasa Ancalong Kutai, Bacan, Bajat, Banjar, Basemah, Batin, Bengkulu, Benkulan, Betawi, Bintuhan, Bukit, Dawas, Jambi, Kaur, Kayu Agung, Kelingi, Kerinci, Kincai, Kubu, Kupang, Lako, Lalang, Lematang, Lemantang, Lembak, Linggau, Lintang, Loncong, Lubu, Melayu Ambon Melayu, Melayu Bacan, Melayu Bali Loloan, Banjar, Melayu Berau, Melayu Bukit, Melayu Deli, Melayu Jakarta, Melayu Jambi, Melayu Kupang, Melayu Kutai, Melayu Maluku, Melayu Manado, Melayu Merau, Melayu Minahasa, Melayu Palembang, Melayu Tenggaraong, Melayu Ternate, Meratus, Minangkabau, Mokokoko, Muko-muko, Musi, Ogan, Orang Laut, Pasemah, Penasak, Penesak, Ranau, Rawas, Ridan, Semendo, Serawai, Serawi, Sindang Kelingi, Suku Batin, Supat, Tenggaraong, Tungal, Tungal Iilir, Ulu, dan Ulu Lako* (SIL 2001). Selain nama-nama yang berhasil dikumpulkan ini, masih banyak lagi variasi bahasa Melayu yang terdapat di lingkungan negara ASEAN. Variasi bahasa Melayu belum terdeteksi atau tidak dapat dideteksi melalui nama di seluruh Indonesia sehingga memerlukan riset lapangan yang komprehensif serta mengandalkan analisis linguistik.

Sementara, pelacakan terhadap semua bahasa di dunia masih dalam proses dan belum tuntas, bahasa-bahasa yang jumlah penuturnya sangat minim satu per satu menuju ke ambang kepunahan. Fenomena ini terjadi di berbagai penjuru dunia termasuk di Indonesia. Faktor utama yang dianggap sebagai penyebabnya adalah terhambatnya proses pewarisan bahasa-ibu dari pihak orang tua ke pihak anak.

Berdasarkan *UNESCO World Language Report*, Barreña dkk (2000: 328—330) melaporkan bahwa kegiatan pewarisan bahasa-ibu dari satu generasi ke generasi berikutnya, di seluruh dunia dapat dikatakan tidak lancar karena hanya sekitar 30% yang dapat berlangsung dengan baik. Kenyataan ini sangat mengejutkan dan mengkhawatirkan. Dengan demikian, 70% kegiatan pewarisan bahasa-ibu dari satu generasi ke generasi berikutnya dapat dikategorikan mengalami berbagai kendala. Kendala yang harus dihadapi antara lain:

- emigrasi,
- sikap bahasa yang negatif,
- tidak adanya perhatian dari pihak pemerintah,
- penjajahan,

- kawin campur,
- adanya diskriminasi kultural,
- asimilasi oleh kelompok budaya yang dominan,
- minimnya jumlah penutur,
- tekanan dari pihak sekolah,
- peperangan, dan
- penyakit AIDS.

Khusus untuk kondisi kebahasaan di Indonesia harus ditambahkan dengan tak terelakkannya desakan penyebaran dan pemakaian bahasa Indonesia ke dalam fungsi dan peran bahasa-bahasa daerah. Dibandingkan dengan berbagai negara lainnya di dunia, dari segi situasi kebahasaan, Indonesia tergolong rumit. Hal ini terjadi, mengingat lebih banyak wilayah yang bersifat heterogen daripada yang bersifat homogen.

3. Situasi Kebahasaan di Indonesia

Membangun sebuah bangsa yang masyarakatnya majemuk bukanlah hal yang mudah. Sewajarnya jika banyaknya persoalan yang muncul, karena terkait dengan kemajemukannya itu, maka merupakan sebuah konsekuensi yang tak terelakkan. Namun kita harus tetap bersyukur kepada Tuhan Yang Maha Pengasih karena telah memberikan tiga anugerah yang tidak akan habis sepanjang masa, kepada bangsa Indonesia ini. Ketiga anugerah tersebut adalah (1) sinar matahari yang berlimpah, (2) tanah vulkanik yang subur, serta (3) samudra yang luas. Ketiga anugerah inilah yang kemudian memunculkan keanekaragaman hayati, fisik serta mineral, dan budaya. Kita harus mensyukuri semua anugerah ini dengan cara menjaga kelestarian lingkungan serta pemanfaatannya. Hal yang patut disyukuri juga adalah bahwa walaupun luas daratan Indonesia hanya sekitar 1,3% dari luas daratan dunia, namun seluruh daratan Indonesia mampu mendukung 17% kehidupan fauna dan flora dunia. Luas perairan Indonesia lebih besar dari luas daratannya serta beriklim khas tropikal antara benua Asia dan Australia, sehingga Indonesia dikenal sebagai Benua Maritim Nusantara. Daratan Brasil, Zaire, dan Indonesia dikenal sebagai daratan *megabiodiversity*. Namun apabila keanekaragaman hayati di darat dan di laut diperhitungkan, maka Indonesia merupakan wilayah *megabiodiversity* terbesar di dunia (Jenie, 2004:4--5).

Sebagaimana kita ketahui bahwa nilai-nilai budaya tidak bersifat universal. Dengan demikian, upaya untuk mengimpor nilai-nilai budaya asing sebagai landasan untuk membangun negara ini bukanlah jalan keluar yang terbaik dan juga belum tentu secara serta-merta dapat diterima oleh publik. Untuk memahami secara langsung nilai-nilai budaya itu sendiri memang tidak bersifat gamblang. Salah satu jendela untuk memasuki ranah budaya bisa dilakukan **melalui bahasa** mengingat salah satu fungsi bahasa adalah sebagai penyimpan tata nilai budaya dalam berbagai bentuk misalnya kosakata, pantun, cerita rakyat, mitos, legenda, dan ungkapan.

Kita harus berani jujur mengakui bahwa ada beberapa negara yang berhasil dan ada pula yang gagal bangkit dari aneka krisis. Kuncinya justru ada dalam budaya itu sendiri. Huntington (2000) menyatakan bahwa budaya—dan bukan politik—menjadi sangat penting karena berfungsi sebagai faktor penentu keberhasilan sebuah masyarakat dalam upaya meningkatkan kesejahteraannya. Budaya di sini lebih pada tata nilai serta simbol-simbol yang mempengaruhi serta membentuk pola pikir dan motivasi masyarakatnya untuk maju. Pandangan Huntington ternyata didukung oleh Grondona (2000) yang berhasil mengidentifikasi dari berbagai riset bahwa justru nilai-nilai budayalah—dan justru bukan politik—yang akan mempertahankan hasil peningkatan kesejahteraan masyarakat.

Pemahaman mengenai situasi kebahasaan di dunia dapat membantu sebagai latar untuk melihat serta menempatkan keanekaragaman bahasa di Indonesia secara proporsional. Keanekaragaman bahasa yang ada di Indonesia hendaknya dilihat sebagai sebuah kekuatan. Makin banyak bahasa yang dikuasai oleh seseorang maka secara otomatis makin luas cakupannya untuk memahami kenyataan dunia yang multidimensi karena setiap bahasa berfungsi sebagai “jendela” untuk “melihat” dunia. Jadi, sesungguhnya kondisi majemuk yang ada di Indonesia justru membantu seseorang anak bangsa untuk mendapatkan gambaran yang lebih komprehensif tentang kompleksitas dunia.

Seiring dengan bergulirnya dinamika multikultural, masalah Hak Asasi Manusia muncul ke permukaan, maka masalah *linguistic right* (hak berbahasa-ibu) pun menjadi topik yang mengemuka. Bahkan UNESCO dalam *Mysore Document 2000* mencanangkan bahwa hak berbahasa-ibu merupakan salah satu hak yang harus dihormati. Dengan demikian, bahasa yang jumlah penuturnya sedikit juga mempunyai hak yang sama dengan bahasa-bahasa besar lainnya.

Penguasaan bahasa Indonesia oleh sejumlah ahli sudah dianggap sebagai salah satu indikator Mutu Manusia Indonesia karena melalui bahasa Indonesialah terjadi penyerapan ilmu pengetahuan. Akibatnya, penduduk yang tak mampu berbahasa Indonesia secara otomatis tak mungkin berkiprah secara intelektual di tataran nasional. Dalam hal ini, bahasa Indonesia sangat membantu dalam menyatukan pikiran dan langkah seluruh masyarakat Indonesia sebagai sebuah bangsa.

Dalam era globalisasi, sudah seharusnya kita memahami profil pemakaian bahasa Indonesia dengan baik agar penyebarluasan bahasa Indonesia dapat dilakukan seefektif mungkin. Selain itu, harus disadari pula bahwa bahasa Indonesia pada umumnya merupakan bahasa kedua bagi orang Indonesia. Sehingga, Hak Berbahasa-Ibu haruslah dipahami dan disikapi dengan bijaksana. Secara ideal, sebaiknya seorang anak Indonesia menguasai minimal tiga buah bahasa sekaligus yaitu menguasai bahasa daerah sebagai pembentuk kepribadian dan penanda jatidiri, menguasai bahasa Indonesia untuk berinteraksi pada tataran nasional di segala bidang, dan menguasai bahasa Inggris untuk berkiprah secara profesional pada segala bidang di kalangan internasional.

Selain itu, sejujurnya pengetahuan kita tentang peran dan fungsi antara bahasa Indonesia, bahasa daerah, dan bahasa asing belum lengkap. Bahkan, pengetahuan kita tentang sosok bahasa-bahasa daerah itu sendiri, satu per satu, di seluruh Indonesia masih minim. Contohnya yang sederhana saja yaitu minimnya pengetahuan kita mengenai variasi dan persebaran bahasa Melayu. Padahal bahasa Melayu memiliki posisi yang relatif sentral karena dianggap sebagai “dasar” pembentukan bahasa Indonesia.

4. Bahasa Daerah

Bangsa Indonesia merupakan bangsa yang multikultural dan multilingual. Sejalan dengan semangat itu, maka pelacakan serta pengembangan terhadap berbagai bahasa daerah di seluruh Indonesia perlu dilakukan secara berkesinambungan. Untuk kondisi Indonesia, bahasa daerah perlu diberi perhatian karena masih lebih banyak berbahasa daerah sehari-hari di rumah dibandingkan dengan yang berbahasa Indonesia. Jika pembangunan karakter bangsa ingin dikelola secara maksimal maka harus memperhitungkan pemakaian bahasa daerah oleh tetua adat untuk menyampaikan butir-butir pembangunan karakter bangsa.

Secara umum, bahasa-bahasa yang ada di seluruh Indonesia berasal dari 2 rumpun bahasa yang berbeda yaitu dari rumpun bahasa *Austriac* yang menurunkan bahasa *Austronesia* yang cenderung terletak di Indonesia bagian Barat dan rumpun bahasa *Papuan* yang menurunkan bahasa-bahasa Papua atau Non-Austronesia yang cenderung terletak di Indonesia bagian Timur. Kita tidak dapat mengesampingkan kehadiran rumpun bahasa Papua/Non-Austronesia, karena (1) rumpun bahasa tersebut berada di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia, (2) penutur Non-Austronesia adalah saudara-saudara kita juga yang berwarga negara Indonesia, (3) rumpun bahasa Papua/Non-Austronesia mencakup sekitar 32,88% dari semua bahasa daerah di seluruh Indonesia yaitu 244 bahasa yang tersebar di wilayah Nusa Tenggara Timur, Maluku, dan Papua, dan (4) keanekaragaman bahasa yang sangat tinggi di Indonesia bagian Timur merupakan bagian dari warisan kekayaan dunia.

Walau pun ada sejumlah ketidaksepakatan yang dihadapi, sekurang-kurangnya terdapat beberapa kesepakatan di antara para ahli bahasa bahwa di Indonesia terdapat 13 bahasa daerah terbesar dengan kriteria penuturnya minimal berjumlah satu juta jiwa. Ke-13 bahasa itu yaitu bahasa Jawa (75.200.000 penutur), Sunda (27.000.000 penutur), Melayu (18.233.900 penutur), Madura (13.694.000 penutur), Minangkabau (6.500.000 penutur), Batak (6.230.000 penutur), Bali (3.900.000), Bugis (3.500.000 penutur), Aceh (3.000.000 penutur), Sasak (2.100.000 penutur), Makasar (1.600.000 penutur), Lampung (1.500.000 penutur), dan Rejang (1.000.000 penutur). Sebagaimana pemerian distribusi pemakaian bahasa yang penuturnya terbanyak di dunia, maka data mengenai 13 bahasa daerah terbesar di Indonesia pun masih dapat diperdebatkan lebih jauh lagi, mengingat jumlah penutur yang diacu saat ini masih mengandalkan data penelitian SIL (2006). Selain itu, sangat dimungkinkan bahwa bahasa Melayu dapat menduduki peringkat yang lebih tinggi, jika semua bahasa yang merupakan variasi bahasa Melayu disatukan.

Selain kesepakatan adanya 13 bahasa daerah terbesar, ternyata ada satu hal lagi yang dapat disepakati yaitu bahwa bahasa daerah di seluruh Indonesia tidak terdistribusi secara merata dari Sabang hingga Merauke. Kenyataannya, kita bisa melihat adanya pola yang meyakinkan bahwa makin ke timur Indonesia justru makin banyak jumlah bahasa daerahnya. Bandingkan, jumlah bahasa di Sumatera tercatat sebanyak 49 bahasa daerah sedangkan di Maluku terdapat 132 bahasa daerah. Padahal jika dilihat dari jumlah penduduknya, makin ke timur jumlah penduduknya malah makin sedikit. Jika kita melihat dari Timur ke Barat maka gambarnya malah berbanding terbalik yaitu makin ke barat Indonesia justru makin banyak jumlah penduduknya. Bandingkan, jumlah penduduk di pulau Jawa diperkirakan sekitar 123.152.000 jiwa dengan jumlah penduduk Papua yang diperkirakan hanya sekitar 2.221.000 jiwa. Bahkan bahasa Jawa dan bahasa Sunda yang menduduki peringkat pertama dan kedua justru kedua bahasa tersebut terdapat di Pulau Jawa.

Dengan demikian, jumlah penutur tiap bahasa daerah sangat bervariasi jumlahnya. Sebagaimana telah disebutkan bahwa bahasa Jawa merupakan salah satu bahasa daerah yang penuturnya paling banyak hingga mencapai 75.200.000 orang. Namun selain 13 bahasa daerah terbesar masih terdapat ratusan bahasa yang jumlah penuturnya beragam termasuk yang sangat sedikit penuturnya untuk dapat bertahan hidup. Saat ini di seluruh Indonesia tercatat 169 bahasa daerah berpenutur maksimum 500 orang yang terancam punah. Bahkan ada bahasa-bahasa daerah yang sudah sangat sedikit penuturnya seperti bahasa Hukumina dan Mapia (masing-masing 1 penutur), Tandia (2 penutur), Kayeli (3 penutur), Bonerif (4 penutur), Naka'ela (5 penutur), Dusner (6 penutur), serta bahasa Lengilu, Hoti, Hulung, Kemarian, Nusa Laut, Piru, Kanum, Bādi, dan Saponi (masing-masing 10 penutur) yang diperkirakan sudah masuk pada tahap sekarat sehingga sangat sulit untuk diselamatkan. Dalam kondisi seperti ini, untuk bahasa-bahasa yang penuturnya minim, terpaksa

diinventarisasi serta direkam saja sebelum bahasa-bahasa itu punah. Bahasa-bahasa ini tidak perlu diperhitungkan untuk pembangunan karakter bangsa, namun tetap sangat berharga sebagai penyimpan khazanah budaya.

Ternyata kondisi kebahasaan di Indonesia sejajar dengan kondisi kebahasaan di dunia yaitu dari 742 bahasa daerah di seluruh Indonesia, hanya 13 bahasa yang penuturnya di atas satu juta orang. Artinya, ke-729 bahasa daerah lainnya atau 98,20% bahasa daerah di Indonesia berpenutur kurang dari satu juta orang. Crystal (2000:15) juga mencatat bahwa 94,7% bahasa-bahasa di seluruh dunia jumlah penuturnya kurang dari satu juta orang.

Pada umumnya, bahasa daerah yang jumlah penuturnya sedikit cenderung merupakan bahasa yang tidak mempunyai tulisan. Dengan demikian, tradisi lisan yang berkembang pada bahasa-bahasa minoritas ini jika tidak segera didokumentasikan maka akan sangat sulit untuk mempertahankan eksistensi mereka.

Proses reformasi dan demokrasi sudah bergulir di Indonesia, namun harus diakui, masih banyak yang harus dibenahi. Salah satu kendala untuk membenahi negara ini terbentur pada dana yang terbatas dan populasi penduduk yang besar yaitu 234.200.000 jiwa (hasil sementara BPS 2010). Menurut Ananta dan Hatmaji (1985), sudah jelas bahwa jumlah penduduk yang besar merupakan “beban pembangunan”. Sehubungan dengan hal itu, masih ada harapan bahwa “beban pembangunan” itu dapat diubah menjadi “modal pembangunan” jika mutu manusianya ditingkatkan. Mutu manusia berperan penting dalam menentukan apakah suatu jumlah penduduk merupakan beban atau modal pembangunan. Jumlah penduduk yang besar memang mempersulit usaha peningkatan mutu semua penduduk Indonesia. Oleh sebab itu, strategi yang paling memungkinkan pada saat ini adalah pengendalian pertumbuhan jumlah penduduk melalui program Keluarga Berencana di satu pihak dan peningkatan mutu modal manusia di lain pihak. Di sinilah perlunya pembangunan karakter bangsa yaitu untuk mengubah “beban pembangunan” menjadi “modal pembangunan”.

Pemakaian dan pengembangan bahasa Indonesia merupakan salah satu segi pembangunan bangsa Indonesia. Sejumlah ahli malah telah menggunakan dan memperhitungkan bahasa Indonesia sebagai salah satu indikator untuk menunjukkan mutu modal manusia Indonesia (Tjiptoherijanto, 1985:259). Andaikata bertambahnya pengetahuan dan pengalaman kerja dapat dijadikan tolok ukur semakin baiknya kualitas seseorang, maka pemakaian bahasa Indonesia tentunya secara tak langsung akan mempengaruhi mutu orang tersebut.

5. Bahasa Indonesia

Situasi kebahasaan di Indonesia yang multilingual, sekurang-kurangnya menyiratkan adanya dua kubu bahasa yang hidup berdampingan yaitu kubu bahasa daerah dan kubu bahasa Indonesia. Situasi diglosik seperti itu, secara alamiah kita dapati di hampir seluruh wilayah Indonesia. Akhir-akhir ini, kehadiran situasi diglosik semakin nyata. Bahasa daerah pada umumnya dipilih untuk menyatakan hal-hal yang bersifat keseharian dan kedaerahan sedangkan bahasa Indonesia dipilih untuk menyatakan hal-hal yang bersifat formal dan resmi kedinasan.

Berdasarkan hasil Penelitian Kelompok LIPI dan UI², dinyatakan bahwa apabila kita hendak memperoleh gambaran sinkronis tentang keadaan kebahasaan dalam masyarakat Indonesia, maka keadaan itu haruslah dipikirkan menurut dua perspektif, yaitu (1) menurut perspektif ketersediaan bahasa, dan (2) menurut perspektif penggunaan bahasa. Menurut perspektif ketersediaan bahasa, bahasa-bahasa membentuk superimposisi dari tiga lapisan interaksi yaitu bahasa sukubangsa; bahasa antarsukubangsa; dan bahasa Indonesia. Pada lapisan dasar terdapat bahasa suku bangsa; di atas lapisan dasar itu terdapat suatu bahasa yang berfungsi sebagai bahasa pergaulan antarsukubangsa. Jika bahasa itu bahasa Melayu maka bahasa ini dapat berfungsi sebagai bahasa sukubangsa dan atau bahasa perantara. Dengan demikian, bahasa Melayu pada lapisan ini dapat pula berperan sebagai bahasa lisan non-formal dengan bahasa Indonesia sebagai mitra formalnya. Akhirnya bahasa Indonesia berada pada lapisan teratas yang mencakupi semua bahasa yang berada pada lapisan-lapisan di bawahnya. Menurut perspektif penggunaan bahasa, bahasa-bahasa tersebut tadi terikat dalam suatu hirarki yang menentukan prioritas bahasa mana dapat dipilih dalam situasi apa. Dalam hal ini bahasa perantara memainkan peranan yang penting.

Situasi kebahasaan di Indonesia ternyata tidak sesederhana yang kita duga. Mengacu pada perspektif ketersediaan bahasa dan perspektif penggunaan bahasa, situasinya lebih bersifat multiglosik daripada diglosik. Kehadiran bahasa perantara, sebagai kenyataan yang hadir di dalam situasi kebahasaan, perlu mendapat perhatian karena bahasa ini seolah-olah menjembatani antara bahasa daerah dan bahasa Indonesia. Bahasa perantara muncul semata-mata karena kebutuhan masyarakat untuk mengekspresikan perasaan dan pikirannya secara tepat dan mengena. Hybrid antara bahasa daerah setempat dengan bahasa Indonesia yang menghasilkan bahasa perantara itu, mereka rasakan dapat memenuhi kebutuhan mereka sebagai alat ekspresi diri yang cocok. Dalam Situasi informal tak tertutup kemungkinan untuk memanfaatkan bahasa perantara sebagai alat menyampaikan substansi pembangunan karakter bangsa.

Sebagai langkah awal, ada baiknya kita menengok sejenak pada kedudukan bahasa Indonesia dalam Undang-Undang Dasar 1945, Bab XV, Pasal 36. yang menyatakan bahwa "*bahasa negara ialah bahasa Indonesia*". Alwi (1993) mengulas lebih lanjut bahwa pernyataan kedudukan bahasa Indonesia sebagai bahasa negara itu, sekurang-kurangnya mengisyaratkan adanya lima fungsi dari bahasa Indonesia yaitu:

- sebagai bahasa resmi dalam penyelenggaraan kehidupan negara dan pemerintahan,
- sebagai bahasa pengantar pada semua jenis dan jenjang pendidikan,
- sebagai bahasa perhubungan nasional,
- sebagai sarana pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, dan
- sebagai sarana pengembangan kebudayaan.

Mengacu kepada penjabaran Alwi (1993) mengenai fungsi bahasa Indonesia itu, maka sekurang-kurangnya dapat dipikirkan bahwa ada lima hal yang harus diperhatikan jika akan melaksanakan pengembangan bahasa Indonesia:

- bahasa Indonesia harus dikembangkan agar penyelenggaraan kehidupan negara dan pemerintahan dapat berjalan dengan baik,
- bahasa Indonesia harus dikembangkan agar menjadi bahasa pengantar yang efektif pada semua jenis dan jenjang pendidikan,

² Penelitian "Pemakaian dan Perkembangan Indonesia dalam Hubungannya dengan Bahasa-Bahasa Daerah di Indonesia" pada tahun 1994.

- bahasa Indonesia harus dikembangkan agar menjadi bahasa perhubungan nasional terutama dalam bidang perencanaan dan pelaksanaan pembangunan nasional
- bahasa Indonesia harus dikembangkan agar menjadi sarana pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, dan
- bahasa Indonesia juga harus dikembangkan agar menjadi sarana pengembangan kebudayaan.

Bahkan dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24, Tahun 2009 tentang Bendera, Bahasa, dan Lambang Negara, serta Lagu Kebangsaan, Bab III, Pasal 25, Ayat (2) *Bahasa Indonesia ... berfungsi sebagai jati diri bangsa, kebanggaan nasional, sarana pemersatu berbagai suku bangsa, serta sarana komunikasi antardaerah dan antarbudaya daerah.*

Untuk dapat mengikuti derap langkah perubahan masyarakat pendukungnya, maka dasar dan arah kebijakan pengembangan bahasa harus berdasarkan situasi kebahasaan yang aktual sehingga menghasilkan bahasa Indonesia yang dapat menjalankan fungsinya dengan baik. Selain itu "persaingan" di antara bahasa daerah, bahasa Indonesia, dan bahasa asing agar terkendali. Saya cenderung melihat pengendalian itu sebagai distribusi komplementer dalam masalah pemakaian bahasa. Tiap bahasa mempunyai fungsi dan perannya sendiri-sendiri sehingga dapat saling melengkapi. Cukup banyak ahli bahasa yang mencemaskan penyebaran dan penyusupan bahasa Indonesia secara besar-besaran sehingga pada akhirnya akan memusnahkan bahasa daerah. Menurut pendapat saya, kekhawatiran itu lebih berdasarkan pada rasa bukan pada fakta di lapangan. Mereka yang mengkhawatirkan kemurnian bahasa-bahasa daerah itu terancam, memberikan "bukti-bukti" pemakaian kalimat yang dianggapnya sudah bercampur-aduk dan tidak lazim dalam aturan bahasa daerah. Apabila dikaji lebih lanjut pada umumnya, bukti-bukti yang mereka ajukan itu adalah sejenis bahasa yang saya golongkan sebagai bahasa perantara, bukan bahasa daerahnya itu sendiri.

Menurut pendapat saya, kekhawatiran musnahnya bahasa daerah tidak berdasar, justru hasil penelitian (Muhadjir dan Lauder, 1990) dapat menunjukkan bahwa pemakaian bahasa Indonesia di seluruh Indonesia porsinya kecil sekali jika dibandingkan dengan pemakaian bahasa daerah. Proporsi pemakaian bahasa Indonesia dan bahasa daerah, baik menurut usia, pendidikan, status sekolah, pekerjaan utama, maupun agama, menunjukkan bahwa lebih dari 85% penduduk Indonesia cenderung menggunakan bahasa daerah. Bahkan Alwi (1993:5) berpendapat bahwa bahasa daerah berfungsi sebagai salah satu sarana pendidikan dini; sebagai landasan pengembangan dan pemerayaan perbendaharaan bahasa Indonesia; sebagai khazanah kebudayaan nasional; dan sebagai salah satu unsur jati diri dan kepribadian bangsa. Hal ini jelas tertera pada Undang-Undang nomor 4, Tahun 1950, Bab IV, Pasal 5, Ayat 1 dan 2 menetapkan bahwa guru diperbolehkan menggunakan bahasa daerah sebagai bahasa pengantar pada tiga kelas terendah di SD. Berdasarkan pendapat itu, lebih lanjut, mungkin dapat diuraikan lagi bahwa bahasa Indonesia berfungsi sebagai sarana berpikir, bahasa daerah berfungsi sebagai landasan pengembangan dan pemerayaan bahasa Indonesia, dan bahasa asing berfungsi sebagai alat memperluas cakrawala berpikir.

Sudah masanya kita menyadari bahwa bahasa Indonesia adalah sebuah bahasa yang multifaset. Jika ditelusur dari proses pembentukannya saja, sudah dapat diperkirakan hadirnya lapis-lapis budaya yang saling berdampingan dan atau bertumpang tindih. Pemahaman yang benar mengenai proses pertumbuhan bahasa Indonesia dapat membantu kita untuk memahami karakteristik bahasa Indonesia dengan lebih baik yang pada akhirnya dapat membantu merumuskan perencanaan pengembangan bahasa itu sendiri dengan lebih cermat. Bahasa Indonesia harus dikembangkan sedemikian rupa agar sesuai dengan fungsi yang diembannya.

Hal itu, ditegaskan pula oleh Moeliono (1985:78) yang menyatakan bahwa pengembangan bahasa Indonesia bertalian erat dengan proses pembangunan nasional yang sedang berlangsung di republik ini.

Sejalan dengan perkembangan jaman, kehidupan kebangsaan pun kian terjalin dengan masyarakat anatarbangsa sebagai mitra dialog yang kian kompleks pula. Sebagai bagian masyarakat antarbangsa, kita pun harus memperkaya khazanah bahasa Indonesia--khususnya kosakata dan peristilahannya--sehingga apa yang kita serap dari lingkungan yang demikian luas dan multidimensional itu dapat juga diteruskan ke dalam masyarakat Indonesia. Proses ini tidak akan ada hentinya, dan oleh karenanya maka juga prosesperkayaan yang dialami oleh bahasa Indonesia berlangsung terus menerus. Mungkin dalam hubungan inilah maka terasa keperluannya untuk menciptakan kata dan istilah (Hassan, 1988)

Sakri (1993) berpendapat bahwa setiap bahasa alami memiliki kemampuan untuk berkembang ke segala arah dan menyesuaikan diri dengan tuntutan komunikasi. Bila muncul perkara atau konsep baru di dalam pengalaman masyarakat bahasa, misalnya temuan baru atau perjumpaan dengan masyarakat lain. Setiap bahasa alami ternyata mampu menemukan cara untuk mencipta kata atau ungkapannya.

Bahasa Indonesia, sebagai alat komunikasi, media pengungkap cita rasa, dan pikiran dapat saja kita biarkan tumbuh sendiri secara alami mengikuti kebutuhan masyarakat pemakainya. Namun hal itu memerlukan waktu. Padahal, tuntutan jaman memacu kita harus bersegera menggapai kemajuan agar sejajar dengan negara-negara lain di dunia ini. Perencanaan bahasa dalam hal ini perencanaan pengembangan bahasa dapat membantu mempercepat laju perkembangan itu.

Otonomi Daerah dapat diharapkan berpotensi untuk melakukan preservasi dan revitalisasi bahasa daerah di kalangan generasi muda. Hal ini, sangat mungkin dilakukan oleh pemerintah daerah setempat karena mereka memerlukan ciri khas juga jati diri untuk provinsinya. Di satu sisi, krisis yang melanda Indonesia sangat meresahkan kita semua, namun di sisi lain ada harapan bahwa pendekatan multikultural mulai ditumbuhkembangkan. Kini saat yang tepat untuk memulai sosialisasi pembangunan karakter bangsa di semua tataran administratif mulai dari provinsi, kabupaten, kecamatan, dan desa.

6. Pembangunan Karakter Bangsa³

Untuk kondisi Indonesia, pembangunan karakter bangsa dapat dilihat dari berberapa sudut pandang:

1. Secara filosofis, pembangunan karakter bangsa merupakan sebuah kebutuhan asasi dalam proses berbangsa karena hanya bangsa yang memiliki karakter dan jati diri yang kuat yang akan eksis.
2. Secara ideologis, pembangunan karakter merupakan upaya mewujudkan secara operasional ideologi Pancasila dalam kehidupan berbangsa dan bernegara.
3. Secara normatif, pembangunan karakter bangsa merupakan wujud nyata untuk mencapai tujuan negara, yaitu melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia; memajukan kesejahteraan umum; mencerdaskan kehidupan bangsa; ikut

³ Semua informasi mengenai Pembangunan Karakter Bangsa mengacu ke Desain Induk Pembangunan Karakter Bangsa, tahun 2010 sebagai pelaksanaan amanat Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025.

melaksanakan ketertiban dunia berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial.

4. Secara historis, pembangunan karakter bangsa merupakan sebuah dinamika inti proses kebangsaan yang terjadi tanpa henti dalam kurun sejarah, baik pada zaman penjajahan maupun pada zaman kemerdekaan.
5. Secara sosiokultural, pembangunan karakter bangsa merupakan suatu keharusan dari suatu bangsa yang multikultural.

Pada awalnya pembangunan karakter bangsa merupakan gagasan besar yang dicetuskan para pendiri bangsa karena sebagai bangsa yang terdiri atas berbagai suku bangsa dengan nuansa kedaerahan yang kental, bangsa Indonesia memerlukan kesamaan pandangan tentang budaya dan karakter yang holistik sebagai bangsa. Hal itu sangat penting karena menyangkut kesamaan pemahaman, pandangan, dan gerak langkah untuk mewujudkan kesejahteraan dan kemakmuran seluruh rakyat Indonesia. Namun pembangunan karakter bangsa yang sudah diupayakan dengan berbagai bentuk, hingga saat ini belum terlaksana dengan optimal.

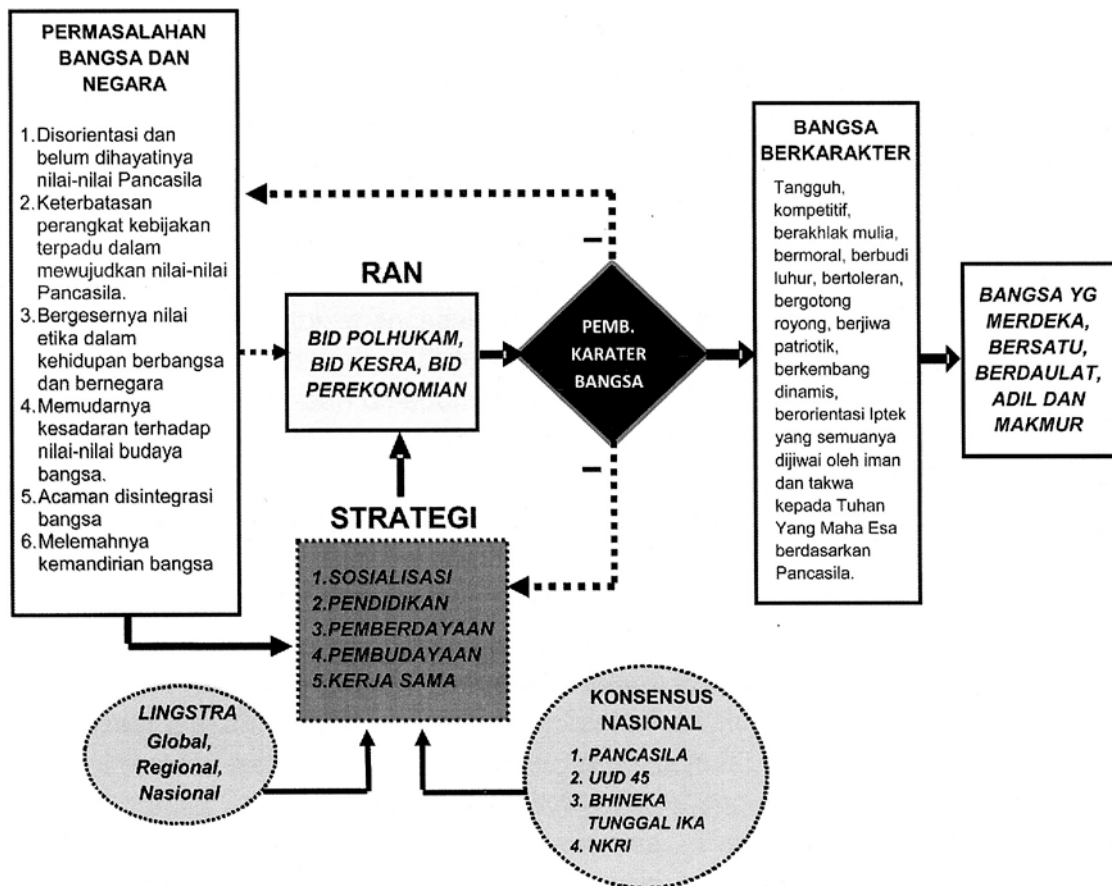
Hal itu tecermin dari kesenjangan sosial-ekonomi-politik yang masih besar, kerusakan lingkungan yang terjadi di berbagai di seluruh pelosok negeri, masih terjadinya ketidakadilan hukum, pergaulan bebas dan pornografi yang terjadi di kalangan remaja, kekerasan dan kerusakan, korupsi yang dan merambah pada semua sektor kehidupan masyarakat. Saat ini banyak dijumpai tindakan anarkis, konflik sosial, penuturan bahasa yang buruk dan tidak santun, dan ketidaktaatan berlalu lintas.

Masyarakat Indonesia yang terbiasa santun dalam berperilaku, melaksanakan musyawarah mufakat dalam menyelesaikan masalah, mempunyai kearifan lokal yang kaya dengan pluralitas, serta bersikap toleran dan gotong royong mulai cenderung berubah menjadi hegemoni kelompok-kelompok yang saling mengalahkan dan berperilaku tidak jujur. Semua itu menegaskan bahwa terjadi ketidakpastian jati diri dan karakter bangsa yang bermuara pada (1) disorientasi dan belum dihayatinya nilai-nilai Pancasila sebagai filosofi dan ideologi bangsa, (2) keterbatasan perangkat kebijakan terpadu dalam mewujudkan nilai-nilai esensi Pancasila, (3) bergesernya nilai etika dalam kehidupan berbangsa dan bernegara, (4) memudarnya kesadaran terhadap nilai-nilai budaya bangsa, (5) ancaman disintegrasi bangsa, dan (6) melemahnya kemandirian bangsa.

Ruang lingkup sasaran pembangunan karakter bangsa mencakup: (1) lingkup keluarga, (2) lingkup satuan pendidikan, (3) lingkup pemerintahan, (4) lingkup masyarakat sipil, (5) lingkup masyarakat politik, (6) lingkup dunia usaha dan industri, (7) lingkup media massa.

Strategi Pembangunan Karakter Bangsa dilakukan melalui sosialisasi, pendidikan pada konteks makro, pemberdayaan, pembudayaan, dan kerjasama. Strategi itu ditopang oleh Konsensus Dasar Pembangunan Nasional yang mencakup Pancasila, Undang-Undang Dasar 45, Bhinneka Tunggal Ika, dan Negara Kesatuan Republik Indonesia serta ditopang oleh Lingkungan Strategis yang mencakup lingkungan Global, regional, dan nasional.

Alur pikir pembangunan karakter bangsa dapat digambarkan sebagai berikut:



Strategi itu diharapkan memberi arah pada pembangunan nasional jangka panjang untuk mencapai misi sebagai berikut.

1. Terwujudnya masyarakat Indonesia yang berakhlak mulia, bermoral, beretika, berbudaya, dan berkeadaban;
2. Terwujudnya bangsa yang berdaya saing untuk mencapai masyarakat yang lebih makmur dan sejahtera;
3. Terwujudnya Indonesia yang demokratis, berlandaskan hukum, dan berkeadilan;
4. Terwujudnya rasa aman dan damai bagi seluruh rakyat serta terjaganya keutuhan wilayah NKRI dan kedaulatan negara dari ancaman, baik dari dalam negeri maupun luar negeri;
5. Terwujudnya pembangunan yang lebih merata dan berkeadilan;
6. Terwujudnya Indonesia yang asri dan lestari;
7. Terwujudnya Indonesia sebagai negara kepulauan yang mandiri, maju, kuat, dan berbasiskan kepentingan nasional

Pembangunan Karakter Bangsa dimulai tahun 2010 ini hingga tahun 2025. Sehubungan dengan hal itu, perlu dibuatkan tahapan prioritas:

Tahap I - (2010—2014)

Tahap ini merupakan fase konsolidasi dan implementasi dalam rangka (1) reorientasi dan penyadaran pentingnya pembangunan karakter, peningkatan komitmen terhadap kebangsaan

Indonesia, serta peningkatan etika dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara; (2) penyusunan perangkat kebijakan yang terpadu dan memberdayakan seluruh subjek yang terkait agar dapat melaksanakan pembangunan karakter bangsa secara efektif.

Tahap II - (2015—2019)

Tahap II merupakan fase pemantapan strategi dan implementasi. Prioritas pada tahap ini adalah melakukan pemantapan strategi dan implementasi pembangunan karakter. Prioritas tersebut berbentuk (1) pengukuhan nilai etika dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara; (2) pengukuhan pelaksanaan pembangunan karakter bangsa. Pada tahap ini dimantapkan hasil-hasil penyadaran mengenai pembangunan karakter bangsa serta implementasinya sehingga menjadi perilaku nyata secara perorangan maupun kolektif.

Tahap III - (2020—2025)

Tahap III merupakan fase pengembangan berkelanjutan dari hasil yang telah dicapai pada tahap I dan II. Pengembangan dilakukan dengan upaya memaksimalkan faktor-faktor pendukung keberhasilan dan meminimalkan faktor penyebab kegagalan melalui proses monitoring dan evaluasi secara berkelanjutan.

Hasil pembangunan karakter bangsa yang diharapkan adalah menjadi sebuah bangsa yang merdeka, bersatu, berdaulat, serta adil dan makmur.

Desain Induk Pembangunan Karakter Bangsa ini dimaksudkan sebagai acuan dalam merancang, mengembangkan, dan melaksanakan Rencana Aksi Nasional (RAN) Pembangunan Karakter Bangsa yang menggalang partisipasi aktif semua pihak yaitu keluarga; satuan pendidikan; masyarakat; pemerintah; generasi muda; lanjut usia; media massa; pramuka; organisasi kemasyarakatan; organisasi politik; organisasi profesi; organisasi masyarakat pemberdayaan perempuan, lembaga swadaya masyarakat termasuk kelompok strategis yang mempunyai dampak luas pada masyarakat seperti elite struktural, elite politik, wartawan, budayawan, pemuka agama, tokoh adat, dan tokoh masyarakat.

Keberhasilan pembangunan karakter bangsa diarahkan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari upaya pencapaian visi pembangunan nasional, yaitu mewujudkan Indonesia sebagai bangsa yang tangguh, kompetitif, berakhlak mulia, bermoral, berbudi luhur, bertoleran, bergotong royong, berjiwa patriotik, berkembang dinamis, dan berorientasi iptek yang semuanya dijiwai oleh iman dan takwa kepada Tuhan Yang Maha Esa berdasarkan Pancasila.

Mengingat penting dan luasnya cakupan pembangunan karakter bangsa dalam rangka mewujudkan masyarakat yang berketuhanan yang Maha Esa, berkemanusiaan yang adil dan beradab, berjiwa persatuan Indonesia, berjiwa kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan, serta berkeadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, maka diperlukan komitmen dari: lembaga penyelenggara negara, dunia usaha dan industri, peran serta masyarakat, serta pemangku kepentingan lainnya untuk menyusun program kerja dan mengkoordinasikan dengan pihak terkait lainnya agar terjadi sinergi antara satu dengan yang lain.

7. Penutup

Desain Induk Pembangunan Karakter Bangsa tidak akan mungkin terlaksana tanpa operasionalisasi dalam bentuk program kerja, namun semua bentuk program kerja itu akan menemui kesulitan jika tidak menggunakan bahasa. Dalam hal ini, posisi bahasa bersifat sentral. Dengan demikian, bahasa Indonesia (dan bahasa Melayu) serta bahasa daerah harus dikelola dengan baik agar dapat berfungsi sebagai alat komunikasi yang efisien serta berfungsi sebagai penyimpan khazanah budaya. Dalam hal ini, yang sangat diperlukan adalah perencanaan bahasa jangka panjang yang komprehensif, meliputi fungsi dan peran bahasa Indonesia, bahasa daerah, dan bahasa asing sehingga dapat menunjang pembangunan karakter bangsa.

Kajian terhadap khazanah budaya yang tersimpan dalam kosakata akan banyak membantu program pembangunan karakter bangsa. Generasi muda yang diperkenalkan dengan esensi filosofi budayanya akan memiliki jati diri yang kuat karena berakar pada etika, norma, filosofi hidup, adat-istiadat, hukum adat, teknologi lokal, dan kearifan lokal dalam mengelola lingkungan dari sebuah budaya turun-temurun yang sudah mapan ratusan bahkan ribuan tahun. Jika setiap anak bangsa memahami eksistensi dirinya dengan mantap maka dia akan menjadi sosok yang kokoh, dapat menerima segala macam bentuk terpaan budaya luar, dan dirinya dapat memilah mana yang baik untuk memantapkan jati dirinya dan mana yang buruk untuk dihindari. Dengan sendirinya cara berbahasa, cara bertegur sapa, dan cara berperilaku akan sesuai dengan nilai luhur budaya bangsa itu.

Upaya meningkatkan fungsi dan peran bahasa daerah melalui ICT perlu segera digarap yaitu dengan membuat situs berbahasa daerah. Untuk tahap awal, pemberdayaan bahasa daerah melalui ICT hendaknya dimulai dengan ke-13 bahasa daerah terbesar. Apabila dilihat dari jumlah penuturnya, ke-13 bahasa daerah terbesar itu sudah mencakup 163.457.900 jiwa atau 79,88% dari seluruh penduduk Indonesia. Diharapkan, dalam waktu dekat mereka dapat segera menikmati akses informasi yang signifikan. Sehingga, kita dapat mengharapkan masyarakat akan berpartisipasi lebih aktif dalam membangun bangsa ini. Tahap kedua mungkin dapat dipilih beberapa bahasa kecil namun wilayah sebar pemakaiannya luas. Ancangan ini tidak ideal akan tetapi skala prioritas harus ditetapkan, sehingga hal inilah yang optimal dapat kita lakukan dalam waktu dekat. harus berani menetapkan bahasa daerah mana yang dipreservasi dan bahasa daerah mana yang dapat direvitalisasi.

Dalam payung yang lebih luas, membentuk komunitas ASEAN merupakan pekerjaan yang berat bagi semua pihak dan juga melibatkan banyak aspek. Hal ini memerlukan kesabaran karena proses pembentukan komunitas ASEAN memerlukan waktu. Kita juga perlu jujur terhadap diri sendiri bahwa komunitas ASEAN yang kita punyai saat ini belum terwujud dengan sempurna. Sebagaimana kita ketahui bersama, relevansi keberadaan ASEAN perlu direnungkan dengan pemikiran yang jernih dan obyektif. Kita harus berani mengakui bahwa selama ini ASEAN yang kita punyai cenderung mengakomodasi kerjasama antarpemerintah saja. Jika ada pihak lain yang dilibatkan maka pelibatan itu terfokus pada para pengusaha dan para akademisi. Kedua kelompok terakhir ini sering kali dimintai pendapat untuk proses pengambilan keputusan di tingkat ASEAN. Akan sangat ideal jika pengambilan keputusan untuk tingkat ASEAN juga “mendengarkan” dan “melibatkan” masyarakat. Kemungkinan, hal ini merupakan salah satu dampak dari kebijakan sesama negara ASEAN untuk saling menghormati dan agar tiap negara menyelesaikan urusan dalam negeri masing-masing. Sehingga, ASEAN lebih terfokus sebagai tempat untuk menjalin persahabatan di antara sesama kepala negara dan sekaligus untuk menjaga stabilitas kawasan.

Saya selaku akademisi menginginkan agar ASEAN itu harus menjadi tempat bagi semua orang di kawasan Asia Tenggara, termasuk *grass roots people*. Banyak aspek kehidupan yang menyangkut hidup orang banyak harus ditata bersama agar kita merasa benar-benar satu komunitas. APA (*ASEAN People's Assembly*) yang pertama diadakan di Pulau Batam pada tahun 2000 dihadiri oleh 300 anggota NGO dan 20 anggota parlemen dari berbagai negara ASEAN. Setiap tahun APA berkumpul untuk secara serius membahas bagaimana caranya membangun komunitas ASEAN, topik yang dibahas berganti setiap tahun, namun topiknya selalu sangat berkaitan langsung dengan semua rakyat di kawasan Asia Tenggara misalnya masalah demokrasi, hak asasi manusia, media massa, gender, dan AIDS/HIV. Jika pembangunan karakter bangsa dapat digerakkan secara serentak di semua negara ASEAN, maka kita sebagai bangsa ASEAN akan menjadi sosok yang mampu bersaing dengan semua negara di dunia ini.

Bahan Bacaan

Alwi, Hasan

1993. "Pembinaan dan Pengembangan bahasa Indonesia ragam Iptek." Makalah Pada Seminar Peningkatan Mutu Pengajaran Bahasa Indonesia Ragam Iptek di Perguruan Tinggi. Bandung: Institut Teknologi Bandung.

Barreña, Andoni dkk.

2000. "World Languages Report: a preliminary approach", *Linguistic Heritage of India and Asia* Mysore, India: Central Institute of Indian Languages

Campbell, George L.

1998. *Concise Compendium of the World's Languages*. New York: Routledge

1989. *Dialect and Education: Some European Perspective*. Clevedon-Philadelphia: Multilingual Matters Ltd.

Crystal, David

2000. *Language Death*. Great Britain: Cambridge University Press.

Fishman, Joshua A.

2001. *Can Threatened Languages be Saved?* Clevedon: Multilingual Matters Ltd.

Grenoble, Lenore dan Lindsay J. Whaley

1996. *Endangered Languages: Language Loss and Community Response*. Cambridge: Cambridge University Press.

Hale, Ken

1992. "Endangered languages: On endangered languages and the safeguarding of diversity", dalam *Language*, Halaman 1—3, Nomor 1, Volume 68.

Kaswanti Purwo, Bambang

2003a. "Penelitian Bahasa Nusantara di Indonesia" Makalah pada Seminar Hari Bahasa-Ibu Internasional. Jakarta: Unika Atmajaya

2003b. "Pengajaran Bahasa Nusantara di Indonesia" Makalah pada Seminar Hari Bahasa-Ibu Internasional. Jakarta: Unika Atmajaya

Kontra, Miklós, Robert Phillipson, Tove Skutnabb-Kangas, dan Tibor Várady

1999. *Language: a Right and a Resource, Approaching Linguistic Human Rights*. Budapest: Central European University Press.

Kramsch, Claire

1997. *Language and Culture*. Oxford: Oxford University Press

Lauder, Multamia RMT.

1990. “*Pemetaan dan Distribusi Bahasa-Bahasa di Tangerang*” Disertasi pada Fakultas Pascasarjana Universitas Indonesia.
2001. “*Upaya Menjajagi Situasi Kebahasaan di Seluruh Dunia*”, dalam *Meretas Ranah: Bahasa, Semiotika, dan Budaya*. Yogyakarta: Yayasan Bentang Budaya.
2002. “*Developing The ASEAN Community through an understanding of its Linguistic and Cultural Diversity*”, Makalah pada ASEAN Linguistics Conference II dengan tema *Language Consolidates ASEAN Solidarity*, Bandar Seri Begawan, Brunei Darussalam.
2005. “*Language Treasures in Indonesia*” dalam *Words and Worlds: World Languages Review*. Clevedon: Multilingual Matters Ltd & UNESCO ETXEA. ISBN 1-85359-827-5.
2006. “*Obstacles To Creating An Inventory Of Languages In Indonesia: A Dialectology Perspective,*” dalam *Language Diversity in the Pacific: Endangerment and Survival*, hlm: 40—53, Clevedon: Multilingual Matters Ltd. ISBN 1-85359-867-4
2007. “*The Position of Regional Languages and Chinese in Indonesia*” dalam *Asian Culture Jurnal*. No. 31, June. Singapore: Institute of Southeast Asian Studies.

Moeliono, Anton M.

1985. *Pengembangan dan Pembinaan Bahasa: Ancangan Alternatif di dalam Perencanaan Bahasa*. Jakarta: Penerbit Djambatan.

Muhadjir dan Multamia RMT Lauder

1990. “*Persebaran Pemakaian Bahasa Indonesia dan Bahasa Daerah.*” Makalah pada Seminar Sociolinguistik IV. Depok: Fakultas Sastra Universitas Indonesia.

Sakri, Adjat

1993. “*Tinjauan Mengenai Perkembangan Bahasa Indonesia Ragam Iptek.*” Makalah pada Seminar Peningkatan Mutu Pengajaran Bahasa Indonesia Ragam Iptek di Perguruan Tinggi. Bandung: Institut Teknologi Bandung.

Skutnabb-Kangas, Tove

2000. *Linguistic Genocide in Education or Worldwide Diversity and Human Rights?* New Jersey: Lawrence Erlbaum Associates, Inc.

Sibarani, Robert

2003. “*Upaya Preservasi bahasa-bahasa Etnik di Sumatra Utara*” Makalah pada Seminar Hari Bahasa-Ibu Internasional. Jakarta: Unika Atmajaya

Suparman, I.A.

1988. “*Keterkaitan Beberapa Indikator Sosial dengan Indikator Tingkat Kemampuan Berbahasa Indonesia,*” Makalah pada Seminar Sociolinguistik I. Depok: Fakultas Sastra Universitas Indonesia.

Veltman, Calvin.

1991. “*Theory and Method in the Study of Language Shift*”, *Language and Ethnicity: Focusschrift in honour of Joshua A. Fishman*. Philadelphia: John Benjamins Publishing Company.

Wierzbicka, Anna

1997. *Understanding Cultures through Their Key Words: English, Russian, Polish, German, and Japanese*. Oxford: Oxford University Press.

Lampiran

Pembentukan karakter bangsa tidak dapat bersifat menyeluruh untuk seluruh rakyat Indonesia. Jika hanya fokus pada anak sekolah dan mahasiswa kurang bergaung karena jumlah mereka tidak mencapai separuh dari populasi. Agar dapat menyentuh seluruh lapisan masyarakat, perlu memperhatikan pula bahasa daerah yang penuturnya sedikit. Mengingat bahasa merupakan alat untuk menanamkan konsep karakter bangsa maka pada masyarakat yang jarang terpajan terhadap bahasa Indonesia perlu mendapat perhatian khusus. Langkah awal untuk melakukan antisipasi adalah mendaftarkan bahasa-bahasa yang jumlah penuturnya sedikit. Crystal (2000:20) menyatakan bahwa bahasa yang dapat dikategorikan sebagai bahasa yang berpenutur sedikit namun masih mempunyai potensi untuk hidup (*viable but small*) adalah bahasa-bahasa yang mempunyai penutur sekurang-kurangnya 1000 orang. Oleh karena itu, sebagai langkah awal diinterpretasikan bahasa-bahasa yang jumlah penuturnya 50% dari angka minimal yaitu sekitar 500 orang atau kurang, dapat dikategorikan sebagai bahasa yang cenderung dianggap memasuki ambang proses berpotensi terancam punah. Sehubungan dengan hal itu, berdasarkan pelacakan dari hasil survei SIL (2001) memperlihatkan bahwa bahasa-bahasa daerah berpenutur 500 orang atau kurang⁴ berjumlah 169 bahasa yang tersebar di wilayah Sumatra, Sulawesi, Kalimantan, Maluku, dan Papua dengan rincian sebagai berikut:

Wilayah Sumatra:

Bahasa Lom: 50 penutur

Wilayah Sulawesi:

Bahasa Budong-budong: 70 penutur, Dampal: 90 penutur, Bahonsuai: 200 penutur, Baras: 250 penutur, Kumbewaha: 250 penutur, Waru: 350 penutur, Taje: 400 penutur, Busoa: 500 penutur, Kalao: 500 penutur, Koroni: 500 penutur, Taloki: 500 penutur, dan Talondo': 500 penutur.

Wilayah Kalimantan:

Bahasa Lengilu: 10 penutur, Punan Merah: 137 penutur, Kereho-Uheng: 200 penutur, Punan Merap: 200 penutur, Punan Aput: 370 penutur, Bukat: 400 penutur, dan Kayan, Wahau: 500 penutur.

Wilayah Maluku:

Bahasa Hukumina: 1 penutur, Kayeli: 3 penutur, Naka'ela: 5 penutur, Hoti: 10 penutur, Hujung: 10 penutur, Kamarian: 10 penutur, Nusa Laut: 10 penutur, Piru: 10 penutur, Amahai: 50 penutur, Paulohi: 50 penutur, Salas: 50 penutur, Aputai: 150 penutur, Emplawas: 250 penutur, Perai: 278, Huaulu: 300 penutur, Kao: 300 penutur, Malay, North Moluccan: 300 penutur, Lorang: 325 penutur, Serili: 328, Kompane: 330 penutur, Benggoi: 350 penutur, Mariri: 390 penutur, Kadai: 400 penutur, Imroing: 450 penutur, Kaibobo: 500 penutur, dan Nuaulu, North: 500 penutur.

⁴ Diurutkan mulai dari bahasa yang minim jumlah penuturnya berdasarkan nama bahasa dan jumlah penutur.

Wilayah Papua:

Bahasa Mapia: 1 penutur, Tandia: 2 penutur, Bonerif: 4 penutur, Dusner: 6 penutur, Kanum, Bádi: 10 penutur, Saponi: 10 penutur, Worja: 12 penutur, Mander: 20 penutur, Kembra: 30 penutur, Burumakok: 40 penutur, Masep: 40 penutur, Marengi: 47 penutur, Morori: 50 penutur, Kwerisa: 55 penutur, Kapori: 60 penutur, Mor: 60 penutur, Kanum, Smärky: 80 penutur, Anus: 100 penutur, Awbono: 100 penutur, Awera: 100 penutur, Bayono: 100 penutur, Burate: 100 penutur, Diuwe: 100 penutur, Duriankere: 100 penutur, Iresim: 100 penutur, Itik: 100 penutur, Kanum, Sota: 100 penutur, Kofei: 100 penutur, Korowai, North: 100 penutur, Kwer: 100 penutur, Liki: 100 penutur, Marub: 100 penutur, Narau: 100 penutur, Sauri: 100 penutur, Sowanda: 100 penutur, Tefaro: 100 penutur, Tofanma: 100 penutur, Tokuni: 100 penutur, Towei: 115 penutur, Maklew: 120 penutur, Senggi: 120 penutur, Dubu: 130 penutur, Obokuitai: 130 penutur, Kanum, Ngkâlmpw: 150 penutur, Taworta: 150 penutur, Usku: 150 penutur, Yafi: 175 penutur, Arguni: 200 penutur, Biksi: 200 penutur, Dabe: 200 penutur, Karas: 200 penutur, Masimasi: 200 penutur, Mer: 200 penutur, Molof: 200 penutur, Momina: 200 penutur, Palamul: 200 penutur, Podena: 200 penutur, Rasawa: 200 penutur, Wares: 200 penutur, Yarsun: 200 penutur, Yoke: 200 penutur, Foau: 232 penutur, As: 250 penutur, Bedoanas: 250 penutur, Biritai: 250 penutur, Burmeso: 250 penutur, Dao: 250 penutur, Erokwanas: 250 penutur, Kaiy: 250 penutur, Kirikiri: 250 penutur, Kopkaka: 250 penutur, Kosadle: 250 penutur, Meoswar: 250 penutur, Mombum: 250 penutur, Uruangnirin: 250 penutur, Yamna: 250 penutur, Yeretuar: 250 penutur, Cital, Tamnim: 290 penutur, Abinomn: 300 penutur, Bagusa: 300 penutur, Elseng: 300 penutur, Kawe: 300 penutur, Koneraw: 300 penutur, Kwerba Mamberamo: 300 penutur, Legenyem: 300 penutur, Sause: 300 penutur, Saweru: 300 penutur, Trimuris: 300 penutur, Waigeo: 300 penutur, Waritai: 300 penutur, Warkay-Bipim: 300 penutur, Doutai: 335 penutur, Auye: 350 penutur, Kimki: 350 penutur, Mlap: 350 penutur, Tause: 350 penutur, Tobati: 350 penutur, Yaur: 350 penutur, Airoran: 400 penutur, Awyi: 400 penutur, Betaf: 400 penutur, Fayu: 400 penutur, Kauwera: 400 penutur, Keder: 400 penutur, Maden: 400 penutur, Manem: 400 penutur, Papasena: 400 penutur, Samarokena: 400 penutur, Wakde: 400 penutur, Yelmek: 400 penutur, Eritai: 420 penutur, Bonggo: 432 penutur, Kaure: 450 penutur, Ndom: 450 penutur, Sekar: 450 penutur, Demisa: 500 penutur, Konda: 500 penutur, Kuri: 500 penutur, Nisa: 500 penutur, Tanahmerah: 500 penutur, Tsakwambo: 500 penutur, Tunggare: 500 penutur, dan Yahadian: 500 penutur.